

## Perspektif Ekonomi Pada Era New Normal Pasca Covid-19

Zulkifli Taib\*, dan Tavi Supriana

Program Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Sumatera Utara  
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

\*Email: zulkiflitaib55@gmail.com

### Abstrak

*Corona Virus Diseases 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan yang banyak menyioroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini juga berdampak pada tataran ekonomi masyarakat lokal sehingga berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020 di salah satu sektor Perikanan sebagai komoditas unggulan Pemda dan merupakan mata pencaharian primadona masyarakat mengalami devisit dari target PAD sebesar 3 Milyar pada masa pandemi ini PAD yang terakomodir 593 juta dari hasil perikanan. Ketahanan pangan para petani ladang dan petani sawah bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan hasil pertaniannya juga dijual. Kenormalan baru adalah mengajak masyarakat morotai utuk dapat menyesuaikan perkembangan jaman pada era digitalisasi untuk meningkatkan ekonomi lewat media online, penjual dan pembeli dilakukan secara langsung tanpa ada pengambilan keuntungan dari pihak ketiga dan efisiensi waktu. Normalitas baru adalah pilihan lingkungan yang sudah melembaga untuk mengembalikan produktivitas yang sempat berkurang atau menghilang atau menjaga momentum efisiensi. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur baik itu riset kepustakaan dan riset lapangan yang sifatnya primer maupun sekunder. Dalam melakukan analisis data, penelitian menggunakan teknik sistematis literatur review, dimana penelitian melakukan proses identifikasi penilaian dan interpretasi data global anjuran mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah berupa karantina, isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu juga pandemi covid-19 juga berimplikasi pada tataran perekonomian masyarakat menurun, devisit perekonomian negara, pendidikat sekolah diliburkan, sektor industri dan usaha banyak yang tutup sehingga menambah angka penganggura pada masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Pasca Covid-19, Era New Normal, Perspektif ekonomi Masyarakat Morotai.*

## PENDAHULUAN

Corona Virus Diseases 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan yang banyak menyioroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama sekali diketahui dari pasien yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara WHO, 13 Juni 2020 (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). Pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga telah memengaruhi kemerosotan ekonomi dunia (Zhang et al., 2020). Sektor yang paling terdampak adalah penerbangan, transportasi, hotel, dan restoran. Situasi yang serba tidak menentu ini akan semakin memperparah stabilitas keuangan global (Winanti & Hanif, 2020).

Pemerintah turun langsung dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini. Pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan physical distancing. Physical distancing berarti melakukan kegiatan mandiri dengan menerapkan jarak minimal 1 meter terhadap manusia yang lain. Akibatnya kegiatan belajar mengajar di kelas secara nasional diliburkan dan diganti dengan sekolah berbasis daring atau online. Tempat wisata sudah banyak yang ditutup. Meniadakan kegiatan car free day di seluruh daerah. Pelarangan mengadakan festival atau pameran. Sebagian jalan menuju pusat kota banyak yang ditutup. Café-café juga dipaksa tutup. Semua kebijakan ini dilakukan untuk mencegah keramaian atau berkumpulnya masyarakat berskala besar dalam satu lingkungan tempat. Sehingga sebagian besar masyarakat memilih untuk di rumah saja sesuai dengan himbuan dari Presiden Jokowi, “bekerja, belajar, dan beribadah dirumah”. Akibatnya perekonomian melemah karena daya beli konsumen yang menurun. Tak hanya itu, sebagian besar pasar banyak yang dipaksa tutup untuk menghindari penyebaran Covid-19 ini. Pedagang-pedagang kehilangan lapaknya lantaran aturan pemerintah ini. Mau tidak mau para pelaku usaha harus memutar otak guna menghindari kerugian

yang lebih besar akibat kebijakan-kebijakan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Menghadapi krisis global akibat pandemi Covid-19 para pelaku usaha baik pengusaha besar, ataupun UMKM dapat tetap bertahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dan menurut peneliti, media sosial dan aplikasi onlineshop bisa dimanfaatkan sebagai alternative pasar sebagai solusi akibat pasar umum yang dipaksa tutup oleh pemerintah (Salam, 2020). Moody's investor Service memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan pada angka 4,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini jauh dibawah pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang berada di angka 5,02%. Dan perlambatan ini akan diprediksi akan berlanjut sampai tahun 2021 meskipun disertai dengan sedikit penguatan sebesar 4,9% (Awali & Rohmah, 2020). Pandemi corona telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Perusahaan Negara banyak yang mengalami kerugian. Sektor usaha swasta pun berangsur runtuh. Masyarakat menjerit karena banyak yang tidak bisa beker-ja mencari nafkah, sementara itu kebutuhan hidup tetap menuntut (Rohmah & Syari, 2020).

Dampak yang terjadi secara langsung pada masyarakat sangat terasa membuat masyarakat kehilangan pendapatan. Hal itu terjadi setelah Pemkab Pulau Morotai berlakukan lock steril, membatasi rute kapal yang masuk di Pulau Morotai. Kondisi ini, membuat anggota masyarakat yang bekerja sebagai TKBM kehilangan mata pencaharian. Kemudian pemenuhan kebutuhan pokok di Morotai terbilang mahal. Terutama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat terasa kesulitan. Kondisi serupa dirasakan para sopir mobil angkutan umum, dimana kebutuhan hidup di dapat dari hasil pendapatan mobil penumpang ini. Dikarenakan sistem transportasinya bukan seperti angkutan umum kota sehingga tiap jam bisa angkat penumpang. Tetapi mengambil penumpang lintas kecamatan yang tergantung penumpang kapal yang masuk ke Pulau Morotai, dan sekarang sudah dihentikan otomatis pendapatan sopir angkot mandeg, sehingga pendapatan buat makan sehari-hari juga berat. Adapun Informasi dari Pemda Morotai akan memberikan insentif bagi para sopir untuk meringankan beban hidup. Tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan. Hal yang sama dialami para pengemudi transportasi alternatif Becak motor (Bentor). sangat sulit mendapat uang di era pandemi Covid-19. Penumpang nyaris tidak ada. Karena, seluruh sekolah diliburkan, kapal dikurangi jadwalnya, masyarakat sudah lebih banyak di rumah menjalankan anjuran pemerintah, isolasi mandiri. Ketika kondisi normal pendapatan becak motor sehari-hari Rp 100 ribu. Kini, hanya Rp 20 hingga 30 ribu sehari, itu kalau dapat penumpang. Bila tidak, maka pulang dengan tangan hampa. Padahal konsumsi tiap hari didapat dari hasil bentor dan setor ke majikan. Bahkan, lebih parah dialami tukang batu, dengan adanya virus corona dirinya kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Terpaksa mengalihkan pekerjaannya kelaut mancing cari ikan sekedar makan atau berkebun.

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti diskripsikan inilah yang kemudian akan peneliti bahas, dimana sesuai dengan permasalahan perlu dianalisis secara ilmiah, penulis melakukan penelitian dengan judul "**Perspektif Ekonomi Pada Era New Normal Pasca Covid-19**". Dimana kenormalan baru perspektif peneliti merupakan suatu pembelajaran maju untuk warga masyarakat yang ada didaerah perbatasan morotai untuk dapat menyesuaikan perkembangan jaman pada era digitalisasi untuk meningkatkan perekonomian melalui media online tempat transaksi dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan konsumen sehingga dapat menekan harga dari para tengkulak atau pihak ketiga dan efisiensi waktu. Normalitas baru menurut peneliti merupakan hasil tafsiran lingkungan untuk masyarakat dapat menyesuaikan dengan lingkungannya pada tataran perkembangan jaman untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial dan daya dukung ekosistem lingkungan dapat dijaga secara bersama.

### **Siklus Bencana dan Implikasinya COVID-19**

Sebagai bencana kesehatan, pandemi COVID-19 harus ditangani sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana secara umum yang bersifat rasional, adekuat (efektif dan efisien), serta berbasis pada delapan prinsip fundamental manajemen bencana, yaitu komprehensif, integratif, pendekatan terhadap segala risiko bahaya, pendekatan manajemen risiko yang sistematis, perencanaan kelangsungan usaha (sustainability), monitoring-evaluasi berkelanjutan, kooperasi dan koordinasi, serta berbasis pada informasi teknis dari para ahli yang akurat. Meskipun Indonesia memiliki kesiapsiagaan pascaepidemi SARS-CoV sebelumnya, namun ternyata karakter pandemi

COVID-19 melebihi kesiapan berbagai pihak di Indonesia, baik di pelayanan primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara awal pandemi, yaitu Republik Rakyat China, pemerintah RRC membangun sarana pelayanan kesehatan secara masif untuk menangani lonjakan kasus yang menyebabkan disparitas kemampuan pelayanan kesehatan untuk menangani warga terdampak. Dalam UU No.6 Tahun 2018, disebutkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Berbagai definisi yang saat ini kita dengar baik di media masa maupun sosial sebetulnya merupakan istilah baku yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2018.

1. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
2. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
3. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
4. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
5. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Selain UU karantina kesehatan, manajemen bencana mengacu pada konsep fase bencana sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Secara umum, siklus bencana terdiri dari tiga fase, yaitu prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Setiap fase memiliki jenis upaya dan kegiatannya masing-masing. Meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dan kedaruratan kesehatan masyarakat, namun situasi Indonesia yang sedemikian luas dan berbasis kepulauan, tentu saja memiliki status penetapan sekuen siklus bencana yang berbeda-beda (Tim Dosen Fakultas Kedokteran Unisba, 2020).

### **Dampak Pandemi Corona Terhadap Perekonomian**

Masyarakat telah merasakan bahwa pandemi corona membawa dampak yang luar biasa, terutama perekonomian. Pada sisi yang lain, pandemi corona juga membawa ketakutan yang luar biasa, se-hingga mereka tidak nyaman dengan adanya pandemi corona ini. Jika seseorang sudah terjangkit virus yang sangat ganas ini, kematian terasa dekat karena bisa menjemput kapan saja. Berita-berita yang beredar di media masa terus menerus silih berganti menayangkan betapa mengerikan kondisi korban corona. Bagi masyarakat yang Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja kantoran mereka tidak masalah dengan logistic, karena masih bisa bekerja dari rumah dan tetap mendapatkan uang tetap setiap bulannya. Akan tetapi bagi pekerja lepas, dan pedagang asongan, pedagang keliling, mereka kehilangan penghasilan yang biasanya mereka dapatkan dengan bekerja dan berdagang keluar rumah.

Sebelum adanya wabah virus corona ini, orang-orang bebas berpergian seperti halnya para orang tua mencari nafkah, anak-anak bersekolah, mahasiswa pergi ke kampus, liburan, shopping atau belanja bersama keluarga ataupun teman. Akibat mewabahnya COVID-19, hal ini membuat banyak orang ennggan keluar dari rumah. Hal ini menjadikan masyarakat benar-benar harus tinggal di dalam rumah (stay at home). Pengaruh corona ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat,

dimana peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap segala sisi kehidupan. Hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian, dunia usaha dan pendidikan. Diantaranya menyebabkan beberapa hal, yakni:

Pertama, Perekonomian masyarakat menurun. Akibat penyebaran virus corona ini juga sudah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari pedagang di pasar, para pedagang sayur, buah ataupun ikan, pedagang jajanan di pasar mau-pun keliling, biasanya mereka mendapatkan pendapatan atau omset dari hasil penjualan, semenjak adanya corona banyak pedagang yang mengeluh akibat kehilangan omset mereka. Dengan munculnya wabah corona, banyak manusia yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, dimana masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker, namun dari sisi lain, masih ada saja yang memanfaatkan situasi seperti ini, seperti halnya penjualan masker, dimana para produsen menjual masker dengan harga yang melonjak tinggi.

Kedua, Perekonomian Negara menurun drastis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi: 1). Perbankan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa kerugian Bank Indonesia mencapai 40,165 triliun disebabkan arus modal asing banyak yang kabur. Kondisi seperti ini sangat tidak sehat karena Negara mengalami kerugian yang besar. 2). APBN mengalami defisit 2,5 %. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan proyeksi penurunan ekonomi pada tahun ini 5-5,4% yang sebelumnya 5,1-5,5%. Kebijakan 3). Pariwisata. Bappenas memprediksi kehilangan devisa dari sektor pariwisata sebesar US\$530 juta. Bank Indonesia memprediksi kehilangan devisa dari sektor pariwisata sebesar US\$ 1,3 Milyar. 4). Perhotelan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan semenjak wabah corona melanda om-set hotel hanya 20% saja, padahal ketika kondisi normal omset hotel dan restoran mencapai lebih 70%. 5). Penerbangan. Omset penerbangan kehilangan 207 milyar rupiah dikarenakan banyak penerbangan yang dibatalkan, dan bandara ditutup.

Ketiga, Dari sisi sosial. Dimana imbas dari virus corona aktivitas sekolah yang biasanya berkumpul, kegiatan belajar-mengajar dengan bapak atau ibu guru, bercanda ria bersama teman, namun pada akhirnya ditiadakan menjadi serba online. Bahkan ujian nasional pun ditiadakan. Sama halnya di kampus, banyak mahasiswa yang mengeluh dengan adanya virus corona mereka tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka, akhirnya dilakukan secara jarak jauh, sehingga proses belajar kurang produktif seperti biasanya.

Keempat, Sektor industri dan sektor usaha. Merebaknya virus corona baru yaitu Sars-CoV-2 yang sebabkan COVID-19 juga mempengaruhi industri dan sektor usaha. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Promosi Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Tommy Kaihatu menuturkan, banyak industri terganggu karena ketergantungan bahan baku dari China sangat besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, tak hanya industri yang terganggu, pandemi COVID-19 juga akan menambah pengangguran. Ia memprediksi, dalam skenario berat potensi pengangguran akan bertambah 2,92 juta orang dan bisa bertambah sangat besar bisa mencapai 5,23 juta. Ini artinya pengangguran di Indonesia bertambah banyak. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar untuk mengatasi masalah pengangguran. Jika masalah pengangguran ini tidak segera di atasi, maka akan muncul berbagai macam tindak kejahatan seperti: pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat sudah selayaknya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang inovatif, dan kreatif di tengah pandemic COVID-19 ini agar angka pengangguran berkurang dan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya (Rohmah & Syari, 2020).

### **Menjaga Momentum Kenormalan Baru atau Mengembalikan Kebiasaan Awal**

Kembali ke konvensional atau mengadopsi normalitas baru adalah pilihan yang tergiring atas lingkungan yang sudah melembaga. Lebih penting lagi adalah mengembalikan produktivitas yang sempat berkurang atau menghilang atau menjaga momentum efisiensi selama WFH di era pasca-Covid 19 nantinya. Wabah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa karakteristik masa depan yang semakin VUCA (vulnerable, uncertainty, complexity, ambiguity) dan penuh kejutan tak terprediksikan (sering diistilahkan sebagai black swan). Produk lembaga perencanaan seperti rencana jangka panjang, menengah, atau bahkan tahunan berpotensi menjadi tidak relevan hanya karena satu guncangan. Dengan demikian apapun yang berkenaan dengan perencanaan menjadi

kurang terlalu relevan untuk menjadi legally and financially binding document. Sehebat apapun evidence yang kita miliki, nampaknya semakin sulit untuk terbukti akurat dan ditaati dengan berbagai dalih force majeure atau variabel eksternal tak terkontrol seperti perang dagang, pandemik, ketidakstabilan geopolitik, dan faktor besar lainnya. Memang, kita perlu memastikan (get things done) dengan cara melihat progres pencapaian setiap komponen dengan membandingkan posisi awal (baseline) dengan sasaran akhir (biasanya diterjemahkan dari visi politik pimpinan). Tetapi karakter VUCA tetap harus melekat dan diantisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta tidak bersifat zakelirk. Bukan berarti lantas dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, RKP lalu kita tinggalkan begitu saja, tetapi mungkin konten dan struktur yang perlu kita sesuaikan sehingga lebih adapt ke VUCA. Selain itu, Bappenas juga diharapkan memiliki nilai (values) baru (misalnya sebagai pemampu atau enabler) dan lebih konkrit menerjemahkan cita-cita bersama (Wardhana, 2020).

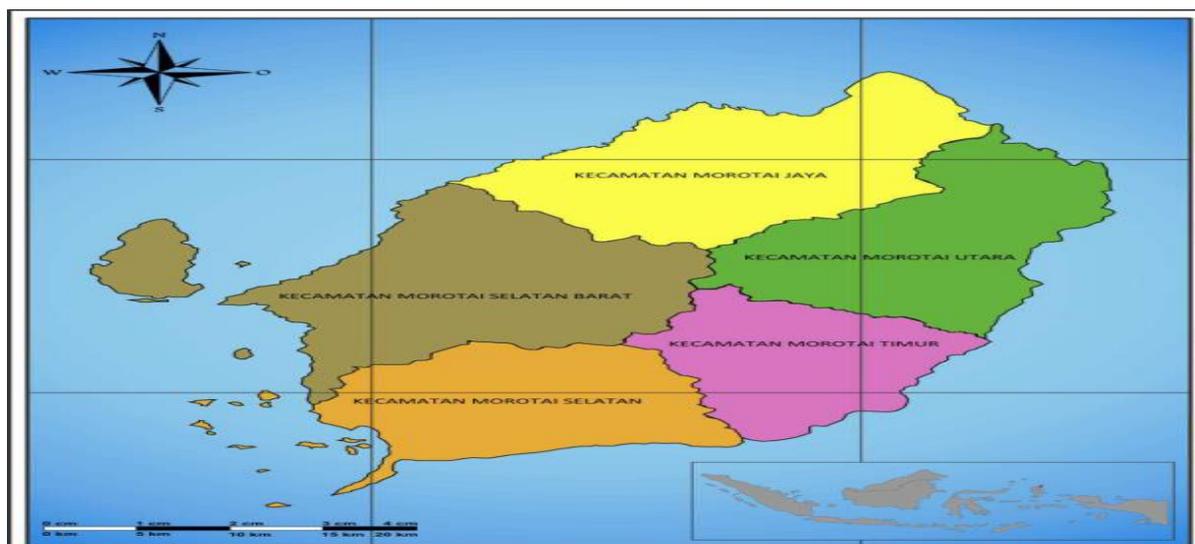
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur baik itu riset kepustakaan dan riset lapangan yang sifatnya primer maupun sekunder (Semiawan, n.d.). Dalam melakukan analisis data, penelitian menggunakan teknik sistematik literatur review, dimana penelitian melakukan proses identifikasi penilaian dan interpretasi sejumlah data yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi tujuan penelitian (Group, 2007). Dengan demikian secara garis besar sumber data yang peneliti gunakan dalam mengembangkan penelitian ini diantaranya adalah sejumlah buku teks, artikel, jurnal, dan prosiding dengan skala nasional dan internasional serta laman websites, berita elektronik, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan dan ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Geografis

Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 2009, dengan luas wilayah total 4.301,53km<sup>2</sup>, yang meliputi wilayah laut 1.970,93km<sup>2</sup>, wilayah daratan 2.330,60km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah, Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Morotai, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Kabupaten Pulau Morotai dengan ibu Kota Daruba, yang dimekarkan pada tahun 2009 memiliki 5 kecamatan dan 88 Desa (BPS Kabupaten Pulau Morotai, 2019).



Gambar 1. Peta Kabupaten Pulau Morotai

Gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pulau Morotai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018 sebesar 1.319,05 Miliar Rupiah. Share terbesar masih didominasi yaitu kelompok pertanian dan perikanan yaitu sebesar 47,26 persen. Dan laju pertumbuhan PDRB tahun 2018 sebesar 6,37 persen dimana laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok transportasi dan pergudangan sebesar 11,28 persen (BPS Kabupaten Pulau Morotai, 2019).

**Tabel 1: Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2017-2018**

Lapangan Usaha	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,26	47,06
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,06
Industry pengelolaan	4,64	4,42
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,01	0,01
Konstruksi	8,23	8,68
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	19,62	19,76
Transportasi dan Pergudangan	2,44	2,44
Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	0,14	0,14
Informasi dan Komunikasi	1,15	1,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,43	1,43
Real Estase	0,10	0,10
Jasa Perusahaan	0,11	0,11
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,26	9,08
Jasa Pendidikan	3,41	3,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	1,58
Jasa Lainnya	0,56	0,47
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka 2019**

Mayoritas Masyarakat Pulau Morotai Menggeluti Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hal ini dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi PDRB kabupaten Pulau Morotai yang dengan presentasi 47,25% ditahun 2017 dan 47,04% yang menempati urutan pertama dan dapat dilihat pada Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2017-2018 (No, Sosial, Nelayan, Di, & Morotai, 2019).

### **Covid-19 Pada Perspektif Ekonomi di Pulau Morotai**

Akibat pandemi virus corona atau Covid-19, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020 disektor perikanan mengalami penurunan yang drastis. Dari target PAD sebesar 3 milyar lebih, selama pandemi Covid-19 atau hingga juni ini PAD yang terkumpul baru mencapai 593 juta. Tahun 2020 ditargetkan PAD harus mencapai 3.075.000.000, posisi sekarang dibulan juni untuk PAD sektor perikanan baru Rp 593 juta. Prediksi penurunan PAD ini juga dikarenakan ekspor komoditi lain berupa ikan roa (julung) juga mengalami penurunan akibat penutupan transportasi untuk pencegahan wabah Covid-19. Meskipun aktifitas nelayan tetap stabil namun kini mengalami kekurangan fasilitas berupa kulstori dan pabrik es, sehingga disaat musim ikan tiba, hasil nelayan tidak bisa ditampung secara keseluruhan. Pemda pulau Morotai beserta masyarakat khususnya nelayan berharap wabah Covid-19 ini cepat berakhir sehingga perekonomian kembali normal. Untuk mempertahankan ketahanan pangan para petani sawah bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi hariannya pada masa pandemi Covid-19 ini.

Hasil panen padi masyarakat petani kabupaten pulau morotai selain sebagai konsumsi, masyarakat petani sawah juga menjual dengan harga Rp. 10.000 sampai dengan Rp 13.000 per kilo gramnya kepada masyarakat sekitar kabupaten pulau morotai. Hal ini dapat mengurangi beban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dipulau morotai. Hal ini diapresiasi oleh bupati pulau morotai pada petani sebagai sosok pahlawan pangan, kartena walaupun dalam kondisi dilanda virus corona (Covid-19) tetapi, semua petani tetap aktif bekerja untuk memnuhi kebutuhan akan beras, namun tetap selalu mengikuti protokol penanganan peyebaran covid-19.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu destinasi wisata di kawasan Timur Indonesia yang kini menjadi favorit wisatawan. Pulau ini menyimpan kesempurnaan wisata bahari yang tidak kalah dengan tempat wisata lainnya. Bukan hanya wisata baharinya yang memukau, Kabupaten Morotai juga sukses menggelar event Festival Morotai yang berlangsung di Daruba, ibu kota Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 2-8 Agustus 2019. Festival Morotai adalah sebuah Festival yang mengajak pengunjung mengenal Indonesia Timur, baik sisi alam budaya dan masyarakatnya. Festival bertaraf nasional ini menyajikan enam event unggulan yang bertumpu pada daya tarik wisata alam (nature), wisata budaya (culture), dan wisata buatan manusia (man-made). Tidak hanya itu, event ini juga berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri), karena menampilkan tarian kolosal dan musik tradisional Bambu Hitada (Tada) oleh 2.196 orang.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Morotai dalam menggelar event berskala nasional tersebut, langsung mendapat apresiasi yang besar oleh semua pihak, termasuk Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya. Bahkan, menpar kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun Morotai. Penegasan itu dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Morotai, Maluku Utara, Selasa (6/8/2019). Menpar menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengembangkan Morotai sebagai salah satu Destinasi Prioritas. Dengan itu mendorong agar percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memudahkan masuknya investasi. Kalau wisatawan mancanegara sudah masuk, sudah pasti bandaranya akan berkembang sendiri. Investasi juga akan masuk. Itu terjadi di Banyuwangi, Belitung, Silangit. Jangka dekatnya bagai mana menarik wisman dari Manado yang relatif sangat dekat. Ini peluang yang sangat menjanjikan.

Bahkan nantinya bisa dibuat direct flight Manado-Morotai. Keindahan Pulau Morotai yang mempunyai lautan pantai nan eksotis. Pantainya indah, bawah lautnya luar biasa. Kulinernya pun terbaik. Sea food disini luar biasa enak. Festival Morotai 2019 akan dihelat setiap tahun. Tahun 2020 kabupaten pulau Morotai masuk dalam 100 Calender of Even Kemenpar RI. Sehingga akan menyelenggarakan Festival Morotai 2020. Festival Moorotai 2019 ini ternyata juga berhasil meningkatkan arus perekonomian di masyarakat Kabupaten Morotai. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar lokasi . mereka terbantu dan sangat bersyukur dengan adanya acara ini. Karena dagangan masyarakat laris diserbu wisatawan. Oleh karena itu masyarakat berharap, Festival Morotai ini digelar setiap tahun sehingga mendongkrak perekonomian warga sekitar.

### **Program Tol Laut**

Adapun Program Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menekan disparitas harga antar daerah. Perekonomian masyarakat juga meningkat dengan mengoptimalkan muatan balik kapal sehingga produk asli daerah setempat dapat dipasarkan luar pulau seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai. Dari tahun 2017 dan secara keseluruhan hasilnya sudah cukup baik. Dengan adanya Tol Laut masyarakat Pulau Morotai sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya berupa makanan hingga material bahan bangunan dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan pendapatan rakyat, Pemkab Pulau Morotai juga mengoptimalkan pemanfaatan muatan balik dengan memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Pengisian muatan balik merupakan program prioritas Pemkab untuk mendorong bahkan memfasilitasi masyarakat dengan memberikan kemudahan dan insentif. Hasil masyarakat tersebut dijual ke pulau Jawa melalui Surabaya sesuai tujuan kapal Tol Laut dari Morotai ke Surabaya. Selama ini sudah banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan mengirimkan hasil hutan, perkebunan, dan perikanan. Pada bulan lalu, sebanyak 40 kontainer diisi sebagai muatan balik Tol Laut. Untuk mendorong masyarakat Pulau Morotai berpartisipasi dalam muatan balik kapal Tol Laut.

Dengan muatan balik ini maka masyarakat menjadi dipermudah dan dilancarkan dalam mengirim barang sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari Program Tol Laut dan dapat meningkatkan perekonomiannya. Selama masa COVID-19 ini peran serta masyarakat untuk mengirimkan barang yang ingin dijual ke pulau Jawa menjadi meningkat. Bahkan rencananya masyarakat akan mengirimkan lebih dari 40 kontainer tapi karena keterbatasan daya angkut dan kapasitas kapal akhir hanya 40 kontainer. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap program Tol Laut. Hal ini dilakukan agar program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini bisa lebih efektif dan efisien. juga akan menambah frekuensi kapal yang awalnya dua minggu sekali menjadi seminggu sekali. Namun, untuk meningkatkan frekuensi kapal pihaknya juga akan menyesuaikan kebutuhan kapal dengan tingkat keterisian barang, yakni okupansi di sekitar 70% baru dapat ditambah frekuensi kapal. Dengan adanya arahan Presiden harus perbaikan performa manajemen kapalnya, terutama ketepatan waktu, kemudian target pencapaian perjalanannya.

### **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus yang penyelenggaranya dipercayakan kepada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Morotai terus memantau perkembangan isu virus corona jenis baru atau Covid-19 dan dampaknya terhadap kawasan yang dikembangkannya tersebut. Virus corona yang merebak di Indonesia sedikit mengganggu perencanaan Jababeka dalam pengembangan Morotai yang masuk sebagai salah satu destinasi 10 Bali Baru. KEK di Kawasan Timur Indonesia Diperkirakan Serap Investasi Rp110 Triliun dengan progres pembangunan hotel sudah mencapai 80 persen, demikian juga vila berikut fasilitasnya yang ditargetkan selesai tahun ini sambil melihat perkembangan dan dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian serta perusahaan.

Perencanaan perusahaan dalam pengembangan KEK Morotai juga terus dipersiapkan. Rancangan hotel resor terpadu seluas 8 hektare di tepi pantai dengan lebih dari 600 unit kamar. Pembangunan tersebut, salah satunya dipersiapkan untuk mengantisipasi wisatawan luar negeri yang datang ke Pulau Morotai pada saat virus corona mereda dan semuanya kembali normal. kendala muncul terkait dengan pembukaan jalur penerbangan. Kendala yang dihadapi tentu ada seperti rencana membuka penerbangan Bali dan Hong Kong ke Morotai akan terganggu dan lain-lainnya. penyebaran wabah virus corona dapat segera diatasi dengan cepat sehingga perekonomian pun akan pulih kembali sehingga turut menggenjot aktivitas ke Morotai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat bahwa jalan lingkar Morotai yang telah rampung adalah ruas sopi ke wayabula sepanjang 6 kilometer dengan biaya sebesar Rp32 miliar. Kemudian, preservasi ruas batas kota Daruba-Daeo/Sangowo-Bere Bere-Sofi-Daruba-Wayabula sepanjang 195,29 kilometer dengan biaya Rp10,43 miliar. Selanjutnya, pembangunan dan penggantian enam jembatan dengan biaya sebesar Rp231,43 miliar meliputi ruas Bere Bere-Sofi sepanjang 152 meter dan 7 meter, jembatan Sofi-Wayabula 1 sepanjang 125,80 meter, Sofi-Wayabula 2 sepanjang 100 meter, Sofi-Wayabula 3 sepanjang 87 meter, dan Sofi-Wayabula 4 sepanjang 125 meter. Hambatan dalam pengembangan kawasan yang dikembangkan pemerintah seiring merebaknya wabah virus corona baru.

### **Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai**

Dampak yang terjadi secara langsung pada masyarakat sangat terasa membuat masyarakat kehilangan pendapatan. Hal itu terjadi setelah Pemkab Pulau Morotai berlakukan lock steril, membatasi rute kapal yang masuk di Pulau Morotai. Kondisi ini, membuat anggota masyarakat yang bekerja sebagai TKBM kehilangan mata pencaharian. Kemudian pemenuhan kebutuhan pokok di Morotai terbilang mahal. Terutama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat terasa kesulitan. Kondisi serupa dirasakan para sopir mobil angkutan umum, dimana kebutuhan hidup di dapat dari hasil pendapatan mobil penumpang ini. Dikarenakan sistem transportasinya bukan seperti angkutan umum kota sehingga tiap jam bisa angkat penumpang. Tetapi mengambil penumpang lintas kecamatan yang tergantung penumpang kapal yang masuk ke Pulau Morotai, dan sekarang sudah dihentikan otomatis pendapatan sopir angkot mandeg, sehingga pendapatan buat

makan sehari hari juga berat. Adapun Informasi dari Pemda Morotai akan memberikan insentif bagi para sopir untuk meringankan beban hidup. Tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan. Hal yang sama dialami para pengendara transportasi alternatif Becak motor (Bentor). sangat sulit mendapat uang di tengah badai Covid-19. Penumpang nyaris tidak ada. Karena, seluruh sekolah diliburkan, kapal dikurangi jadwalnya, masyarakat sudah lebih banyak di rumah menjalankan anjuran pemerintah, isolasi mandiri.

Ketika kondisi normal pendapatan becak motor sehari diatas Rp 100 ribu. Kini, hanya Rp 20 hingga 30 ribu sehari, itu kalau dapat penumpang. Bila tidak, maka pulang dengan tangan hampa. Padahal konsumsi tiap hari didapat dari hasil bentor dan setor ke majikan. Bahkan, lebih parah dialami tukang batu, dengan adanya virus corona dirinya kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Terpaksa mengalihkan pekerjaannya kelaut mancing cari ikan sekedar makan atau kekebun. Masyarakat kabupaten pulau morotai mereka berharap agar badai pandemi Covid-19 ini cepat berakhir. Sehingga, kondisi sosial ekonomi kembali normal, agar lalulintas orang maupun barang lancar masuk ke Pulau Morotai dan mereka dapat bekerja seperti biasa. Pada mengambil kebijakan lewat Musrenbang yang untuk jaring sosial dengan memberikan insentif kepada sopir mobil penumpang, sopir bentor, PKL Barito dan lainnya. Pemkab Pulau Morotai telah membahas dan menetapkan perencanaan anggaran sekitar 16 miliar untuk membantu masyarakat saat wabah Covid-19.

**Tabel 2. Analisis SWOT Perspektif Ekonomi Pada Era Neo Normal Pasca Covid-19 di Daerah Perbatasan 3T Kabupaten Pulau Morotai Provinsi maluku Utara**

	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Evaulasi Internal  Evaluasi Ekternal	1. Tujuh Runway landasan Pacu Pesawat terbang terbesar didunia 2. Kawasan Ekonomi Khusus 3. Daerah prioritas kawasan Perbatasan	1. Minimnya Sumber daya Manusia (SDM) 2. Pemahaman dan Daya dukung Masyarakat lemah 3. Jarak jangkauan dengan ibukota Provinsi
Peluang (Opportunity)	Strategi (S-O)	Stategi (W-O)
1. 10 Destinasi Wisata Indonesia 2. Masuknya Tol Laut 3. Jaringan Internet	1. Meningkatkan Daya Dukung Pariwisata 2. Memasarkan hasil prodak keluar lewat tol laut ke daerah jawa. 3. Memanfaatkan media internet untuk memasarkan produksi barang yang dihasilkan.	1. Melengkapi fasilitas tempat wisata sesua dengan kebutuhan pengunjung 2. Meningkatkan kualitas produksi sesuai dengan permintaan pasar 3. Meningkatkan promosi di berbagai media.
Ancaman (Threat)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
1. Adanya Tempat Wisata baru 2. Jarak akses yang jauh 3. Kuranya manajeman yang baik	1. Intens Mempromosikan tempat wisata 2. Mempermudah daya dukung untuk akses ke lokasi wisatah 3. Meningkatkan tata kelolah yang baik	1. Meningkatkan kegiatan untuk mempromosikan tempat wisata 2. Akses lokasi wisata dengan tata kelolah yang baik. 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Sumber: diolah oleh peneliti

Dari SWOT Perspektif Ekonomi Pada Era Neo Normal Pasca Covid-19 di Daerah Perbatasan 3T Kabupaten Pulau Morotai Provinsi maluku Utara dapat dideskripsikan bahwa adanya peluang pada warga masyarakat kabupaten pulau morotai di tinjau dari aspek geografisnya

merupakan daerah prioritas perbatasan yang diperhatikan pemerintah pusat, sehingga di jadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mempunyai Tujuh Runway landasan Pacu Pesawat terbang terbesar didunia yang memudahkan arus transportasi udara. Ditunjang dengan masuknya tol laut sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat untuk menekan disparitas harga antar daerah. Adanya kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat menguntungkan pendapatan warga masyarakat yang dapat berimplikasi untuk kesejahteraan secara ekonomi. Hal ini didukung adanya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidup dengan memanfaatkan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat dapat secara langsung menjual hasil produksinya pada wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke pulau morotai secara konvensional dan mempromosikan produk lokal secara online.

## KESIMPULAN

Pandemi virus corona atau Covid-19, berimplikasi pada perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020 disektor perikanan mengalami penurunan yang drastis. Dari target PAD sebesar 3 milyar lebih, selama pandemi Covid-19 atau hingga juni ini PAD yang terkumpul baru mencapai 593 juta. Untuk mempertahankan ketahanan pangan para petani sawah bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi hariannya pada masa pandemi Covid-19 ini. Hasil panen tanaman hultikultura dan padi sebagai konsumsi, petani juga menjual hasil panen padinya dengan harga Rp. 10.000 sampai dengan Rp 13.000 per kilo gramnya kepada masyarakat sekitar Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini dapat mengurangi beban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dipulau morotai.

Hal itu juga dilakukan para petani dan nelayan yang memasarkan hasil produksinya secara konvensional dan secara online. Yang dilakukan secara online disebarakan lewat media internet lewat Facebook, grup WA, grup jual beli local setempat yang langsung mempertemukan penjual dan pembeli yang dapat diakses langsung ketempat penjualan atau diantar oleh penjual ke pembeli sesuai dengan kesepakatan, aktifitas jual beli yang dilakukan secara online oleh masyarakat morotai ini dilakukan antar warga masyarakat lokal morotai, hal ini dapat menguntungkan penjual dan transaksi konsumen lebih puas dengan harga yang diberikan hasil produksi barang dibandingkan dengan cara konvensional yang dibeli oleh tengkulak kemudian dijual ulang oleh tengkulak kepada masyarakat, hal ini memberikan kita pembelajaran bahwa apakah kita pada pilihan untuk menjaga momentum kenormalan baru atau mengembalikan kebiasaan awal.

Kenormalan baru ini menjadi pembelajaran masyarakat Morotai pada khususnya utuk dapat menyesuaikan perkembangan jaman pada era digitalisasi dimana melakukan pemasaran barang dagangan antara penjual dan pembeli dapat secara langsung mengadakan transaksi jual beli dilakukan tanpa ada pengambilan keuntungan dari pihak ketiga sehingga dapat menekah harga yang jauh lebih murah. Normalitas baru adalah pilihan yang tergiring atas lingkungan yang sudah melembaga. Lebih penting lagi adalah mengembalikan produktivitas yang sempat berkurang atau menghilang atau menjaga momentum efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awali, H., & Rohmah, F. (2020). Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan Di Tengah Dampak COVID-19. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 1–14.
- BPS Kabupaten Pulau Morotai. (2019). *Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka 2019*. 304.
- Group, S. E. (2007). *Методу за автоматично управление на подъемни устройства при Jack-up системите*. <https://doi.org/10.1145/1134285.1134500>
- No, V., Sosial, A., Nelayan, E., Di, T., & Morotai, K. P. (2019). *Agriprimatech Agriprimatech*. 3(1).
- Rohmah, S. N., & Syari, F. (2020). Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19? 'ADALAH'; *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 63–74.
- Salam, M. A. K. (2020). Perilaku Produksi di Tengah Krisis Global Akibat Pandemi Covid-19 dan Memanfaatkan Media Online Facebook Sebagai Alternatif Pasar. *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi ISSN: 1979-9888*, 1–21.

- Semiawan, C. R. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Tim Dosen Fakultas Kedokteran Unisba. (2020). *Bunga Rampai Artikel Penyakit Virus Korona (COVID-19) Editor : Titik Respati*. 1–243.
- Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 223–239. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.110>
- Winanti, P. S., & Hanif, H. (2020). When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance. *Environmental Policy and Governance*, (December 2018), 263–275. <https://doi.org/10.1002/eet.1907>
- Zhang, W. R., Wang, K., Yin, L., Zhao, W. F., Xue, Q., Peng, M., ... Wang, H. X. (2020). Mental Health and Psychosocial Problems of Medical Health Workers during the COVID-19 Epidemic in China. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 89(4), 242–250. <https://doi.org/10.1159/000507639>